



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya DPMPTSP Kabupaten Mamuju, yang memuat gambaran umum perangkat daerah, Rencana Strategis 2021–2026, Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan pengukuran kinerja, Serta akuntabilitas penyerapan keuangan yang efektif dan efisien.

Selain itu, laporan ini berfungsi sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*), sekaligus sebagai umpan balik untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Dengan selesainya laporan ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat mendukung kemajuan bersama di Kabupaten Mamuju.

Mamuju, 30 Januari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mamuju



HJ.HASNAWATY SYAM,S.E.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda -IV/c

NIP 19680928 200604 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	
1.3 Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1.4 Kepegawaian (Sumber Daya Manusia).....	8
1.5 Aspek-Aspek Strategis	10
1.6 Isu Strategis Perangkat Daerah	10
1.7 Landasan Hukum	11
1.8 Sistematika	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis	13
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	16
2.3 Perjanjian Kinerja	22
2.4 Perencanaan Anggaran	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	24
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	24
3.3 Membandingkan AntaraTarget dan Realisasi Tahun 2025	26
3.4 Membandingkan Realisasi Kinerja S/D Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	32
3.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional	58
3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan /Penyusunan Kinerja	59
3.7 Analisis Atas Efisien Penggunaan Sumber Daya.....	60
3.8 Inovasi DPMPTS Kabupaten Mamuju.....	61
3.9 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan	
Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	63
3.10 Realisasi Anggaran Tahun 2025	67
BAB IV PENUTUP	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel, Pemerintah menetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 sebagai pedoman teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap instansi pemerintah bertanggung jawab atas pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran secara terukur dan periodik. Penerapan SAKIP di perangkat daerah tidak hanya menyesuaikan dengan visi dan misi daerah, tetapi juga selaras dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Melalui perencanaan kinerja yang terukur, indikator kinerja yang jelas, serta pelaporan dan evaluasi berkala, setiap perangkat daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga pembangunan daerah berjalan sistematis, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju dituntut untuk terus melakukan pembenahan kinerja, guna meningkatkan peran dan fungsinya dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik yang optimal.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran, sekaligus menjadi alat evaluasi dan perbaikan demi peningkatan kinerja dan pelayanan publik di masa mendatang. Adapun tujuan penyusunan LKjIP antara lain:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Peraturan Bupati Mamuju Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

a. Tugas Pokok

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

b. fungsi Organisasi

Dalam melaksanakan tugas Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

c. Susunan Organisasi

- 1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub bagian umum; dan
 2. Kelompok JF; dan
 3. Pelaksana.
 - c. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari:
 1. Koordinator JF dan Kelompok JF Penanaman Modal; dan
 2. Koordinator JF dan Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- 4) Kelompok JF dipimpin oleh Koordinator kelompok JF.
- 5) Pelaksana bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Bidang berdasarkan tugas dan fungsi.
- 6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi pelayanan di Bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- 2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
- 3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan, merencanakan, mengoorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
 - b. merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas;
 - c. merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional urusan penanaman modal;
 - d. merumuskan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas;
 - e. merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional urusan perizinan dan non perizinan;
 - f. merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional monitoring dan evaluasi;
 - g. membina sekretaris dan koordinator JF dalam melaksanakan tugasnya;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
 - i. membina kepala sekretariat dan para koordinator JF dalam melaksanakan tugasnya;
 - j. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
 - k. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
 - l. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa

berjalan optimal;

- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan program dan penanaman modal, perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Sekretariat membawahi:

- a. Sub bagian umum;
- b. Kelompok JF; dan
- c. Pelaksana.

Sub Bagian Umum

(1) Kepala Sub Bagian umum mempunyai tugas, fungsi dan rincian tugas.

(2) Sub Bagian umum dipimpin oleh kepala sub bagian.

(3) Kepala sub bagian mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi;
- b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
- c. monitoring, dan evaluasi;
- d. pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. keuangan;
- f. urusan umum;
- g. ketatausahaan;
- h. kerumahtanggaan;
- i. pengelolaan barang milik daerah;
- j. kehumasan;
- k. dokumentasi; dan
- l. administrasi kepegawaian dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Fungsi sub Bagian umum meliputi:

- a. perencanaan dan penyusunan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, meliputi usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti pegawai, sasaran kerja pegawai dan lain-lain yang menyangkut urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- d. pelaksanaan bina hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

(5) Rincian tugas sub Bagian umum sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan dan penyusunan program kerja;
- b. membagi tugas pelaksanaan administrasi kepegawaian, meliputi usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti pegawai, sasaran kerja pegawai dan lain-lain yang menyangkut urusan kepegawaian agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas;
- d. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas;
- f. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas;
- g. menyelenggarakan, mengelola administrasi kesejahteraan dan peningkatan kapasitas pegawai; kepegawaian,
- h. menginventarisasi pegawai, untuk usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, sasaran kerja pegawai dan lain-lain yang menyangkut urusan kepegawaian;
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan dan pendataan inventaris kantor;
- j. melaksanakan bina hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan;
- m. menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

JF Penanaman Modal

(1) Koordinator JF dan Kelompok JF penanaman modal sebagaimana mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan;
- b. merumuskan; dan
- c. melaksanakan kebijakan teknis bidang penanaman modal.

(2) Kelompok JF Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;

- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum.;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JF Pelayanan Perizinan

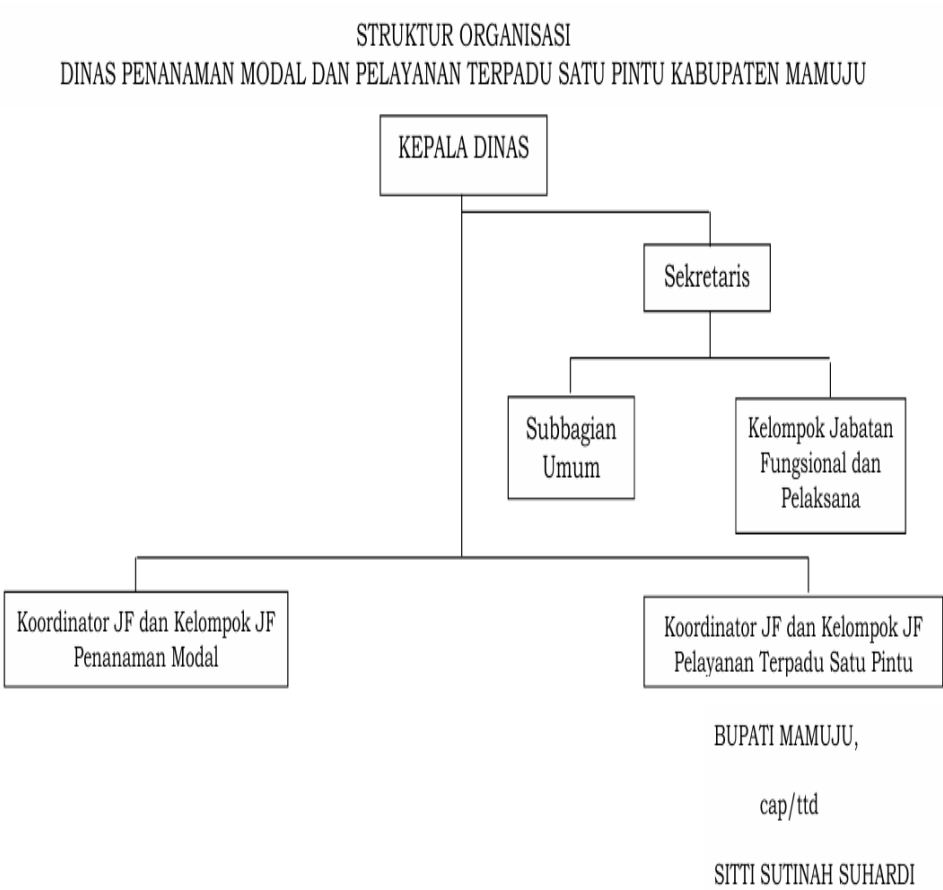
- 1) Koordinator JF dan Kelompok JF pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Kelompok JF pelayanan terpadu satu pintu, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;

- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1

Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Mamuju

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
MAMUJU NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH



1.4 Kepegawaian (Sumber Daya Manusia)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2025 terdapat jumlah pegawai 53 Orang terdiri dari 1 Orang Pimpinan (Kepala Dinas), 1 Orang Sekretaris, 2 Orang Kepala Bidang, 1 Orang Kasubag Umum dan Kepegawaian, 17 Orang Jabatan Fungsional, pelaksana 14 orang dan Non ASN 17 Orang. Adapun Susunan kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Mamuju Sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Jabatan DPMPTSP Kab. Mamuju

NO	TINGKAT ESELON	JUMLAH
1	ESELON II B	1
2	ESELON III A	1
3	ESELON III B	2
4	ESELON IV A	1
5	JABATAN FUNGSIONAL	17

Sumber : DPMPTSP Kab. Mamuju Tahun 2025

Tabel. 1.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin DPMPTSP Kab. Mamuju

No	Uraian	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1	ASN	7	29
2	Non ASN	8	9

Sumber : DPMPTSP Kab. Mamuju Tahun 2025

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan DPMPTSP Kab. Mamuju

No	Unit Kerja	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	D.III	S1	S2	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	1	1	2
4	Kepala Sub Bagian	-	-	1	-	1
5	abatan Fungsional	-	-	16	1	17
6	Pelaksana	7	2	5	-	14
7	Non ASN	5	-	12	-	17
Jumlah		12	2	35	4	53

Sumber : DPMPTSP Kab. Mamuju Tahun 2025

1.5 Aspek-Aspek Strategis

1. **Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju** adalah merumuskan, menyusun, dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu guna mendukung peningkatan investasi dan kemudahan berusaha di daerah.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, khususnya pada fokus *Peningkatan Realisasi Investasi*, melalui penyederhanaan prosedur, percepatan pelayanan, dan peningkatan kualitas tata kelola perizinan
3. .Dalam rangka mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan kepada Masyarakat dan Investor sebagai instrumen kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif.
4. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempermudah akses perizinan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju menyediakan layanan perizinan secara daring melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan inovasi layanan JEBOL UMKM.

1.6. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis perangkat daerah Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (Isu strategis RPJMD)
2. Belum optimalnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana
3. Perlunya peningkatan iklim investasi yang kondusif, berdaya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
4. Belum tersedianya database perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang akurat
5. Masih Kurangnya data potensi unggulan daerah sebagai bahan penyusunan Peluang

Investasi Kabupaten Mamuju melalui kegiatan Promosi

6. Belum Optimalnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten
7. Peningkatan pelayanan publik baik layanan perizinan maupun non perizinan dengan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi (Isu Strategis RPJMD).

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Restra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan iklim investasi yang kondusif, berdaya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
2. Peningkatan pelayanan publik baik layanan perizinan maupun non perizinan dengan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi

1.7. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 24)
6. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.8 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2025 adalah:

BAB I	PENDAHULUAN
	Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum Perangkat Daerah kepegawaian (Sumber Daya Manusia), Aspek-Aspek StrategisIsu Strategis Perangkat Daerah, Landasan Hukun dan Sistematika
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 - 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026.

1. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju adalah **Mamuju Keren (Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman)**

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2021- 2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju yang mengacu pada **Misi ke-5, yaitu Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal.**

3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Meningkatkan Investasi Daerah degan Indikator Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA “ sedangkan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupeten Mamuju antara lain :

- 1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal dengan indikator : Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)
- 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan NonPerizinan dan Penanaman Modal dengan indikator IKM
- 3. Terselenggaranya Birokrasi DPM-PTSP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan Indikator Nilai AKIP

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
DPMPTSP Kabupaten Mamuju

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					
		Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Menigkatka n Investasi Daerah	Meningkatny a Realisasi Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
		Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	310.000.000.00	325.000.000.00	340.000.000.00	355.000.000.00	360.000.000.00	375.000.000.00
	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	90	90	90	90	90

	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	B	B	B	B	BB	A
--	---	-------------------	---	---	---	---	----	---

Sumber : Renstra DPMPTSP Kab. Mamuju Tahun 2021-2026

2.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mamuju Tahun 2025 . Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju sebagai berikut :

Tabel 2.1												
Indikator Kinerja Utama (IKU)												
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2024-2026 (Sebelum Revisi)												
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET						FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	TARGET WAKTU	KET
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	Milyar/ Rupiah	310	325	340	355	360	375	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Definisi operasional jumlah nilai investasi PMDN/PMA yaitu dihitung berdasarkan atas persetujuan dan besaran investasi yang direalisasikan di daerah	Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	1 Tahun	Eselon II

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	80	90	90	90	90	90	Nilai Skor IKM Definisi Opearsional IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1 Tahun	Eselon II
--	----------------------------------	------	----	----	----	----	----	----	--	----------------------------------	---------	-----------

Terselenggaranya Birokrasi OPD yang Efektif,Efisien dan Berorientasi pelayanan prima	Predikat AKIP	Predikat	B	B	B	B	BB		Ada/Tidak	Hasil Nilai	1 Tahun	Eselon
								A	Defisini Operasional Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik	Evaluai dari Inspektorat		II

Sumber : Indikator Kinerja Utama 2021-2026 DPMPTSP (sebelum revisi)

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2025 (Setelah direvisi)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	TARGET WAKTU	KET
			2024	2025	2026				
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi	Milyar/Rupiah	700	707	714	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	1 Tahun	Eselon II
	Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)					Definisi operasional jumlah nilai investasi PMDN/PMA yaitu dihitung berdasarkan atas persetujuan dan besaran investasi yang direalisasikan di daerah			
Meningkatnya	Indeks	Skor	90.36	90.37	90.38	Nilai Skor IKM	Hasil	1 Tahun	Eselon II

Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Kepuasan Masyarakat (IKM)					Definisi Opearsional IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Survey Kepuasan Masyarakat		
---	---------------------------------	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--

Terselenggaranya Birokrasi OPD yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pelayanan prima	Predikat AKIP	Predikat	BB	BB	A	Ada/Tidak	Hasil Nilai Evaluasi dari Inspektorat	1 Tahun	Eselon II
						Predikat Akuntabilitas Instansi Pemerintah diukur melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menetapkan, mengukur, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah. Predikat akuntabilitas ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap kinerja instansi pemerintah dan dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain: 1. AA (Sangat Memuaskan): Nilai > 90 – 100 2. A (Memuaskan): Nilai > 80 – 90 3. BB (Sangat Baik): Nilai > 70 – 80 4. B (Baik): Nilai > 60 – 70 5. CC (Cukup): Nilai > 50 – 60 6. C (Kurang): Nilai > 30 – 50 7. <u>D (Sangat Kurang): Nilai 0 - 30</u>			

Sumber : Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2025 (Setelah direvisi)

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah di sepakati bersama.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	707.000.000.000
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	IKM	90,37
3	Terselenggaranya Birokrasi DPM-PTSP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima	Nilai AKIP	BB

Sumber Data : Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2025

2.4 Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka disediakan anggaran sebesar Rp. 3.674.654.370,00 sedangkan untuk anggaran perubahan tahun 2025 adalah Rp. 3.384.418.417,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rincian Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran Pokok (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.499.404.870,00	Rp. 3.255.053.917
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 15.792.000,00	Rp. 0,00
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 26.140.000,00	Rp. 15.880.000,00
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 120.799.500,00	Rp. 78.086.500,00
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 39.318.000,00	Rp. 35.398.000,00
	Jumlah	Rp. 3.701.454.370,00	Rp. 3.384.418.417,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja DPMPSTP Tahun 2025 tercermin dari tingkat pencapaian sasaran strategis yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
Menigkatkan Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/ PMA	15%	-72,1%	-480%	Press Release Keminves/ BKPM
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	707.000.0 00.000	281.602.0 11.403	39,83 %	Press Release Keminves / BKPM
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,37	93,283	103,2 %	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025
Terselenggarany a Birokrasi OPD yang Efektif,Efisien dan Berorientasi pelayanan Prima	NILAI AKIP OPD	BB (70)	-	-	Sementara Proses

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama menunjukkan capaian yang memenuhi target pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan capaian 103,2 % Sementara itu, realisasi investasi Kabupaten Mamuju tahun 2025 tercatat sebesar Rp281.602.011.403 atau mengalami penurunan sebesar 72,1%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh dinamika investasi pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), serta perubahan struktur investasi berdasarkan sektor usaha. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mamuju Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Capaian
1	Melebihi / Melampaui Target	1
	Sesuai Target	0
	Tidak Mencapai Target	0

3.3 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun 2025

Tujuan : Meningkatkan Investasi Daerah

Indikator kinerja untuk sasaran meningkatkan Investasi daerah adalah nilai investasi daerah yang terdiri atas nilai investasi daerah PMA dan PMDN. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan Modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Tahun 2025 persentase kenaikan nilai realisasi PMA dan PMDN mengalami penurunan dengan realisasi -72,1% dengan capaian kinerjanya -480% dari target 15% berikut tabel Capaian Nilai Investasi Daerah PMA dan PMDN Tahun 2025:

Tabel 3.4
Capaian Nilai Investasi Daerah Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	15%	-72,1%	-480%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sasaran strategis “Meningkatkan Investasi Daerah” diukur melalui indikator Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA. Pada periode pelaporan, target kenaikan yang ditetapkan sebesar 15%, namun realisasi yang dicapai justru mengalami penurunan sebesar -72,1%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar -480%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa target peningkatan investasi daerah belum tercapai dan bahkan mengalami kontraksi yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan nilai realisasi PMDN/PMA ini mengindikasikan adanya faktor-faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi minat dan realisasi investasi, seperti kondisi perekonomian, iklim usaha, daya saing daerah, maupun kendala dalam proses perizinan dan implementasi proyek investasi.

Kondisi ini memerlukan perhatian dan langkah strategis yang lebih intensif, antara lain melalui penguatan promosi potensi daerah, peningkatan kemudahan dan kepastian perizinan, pemberian insentif investasi, serta peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Evaluasi menyeluruh terhadap faktor penyebab penurunan juga perlu dilakukan agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dalam mendorong pertumbuhan investasi pada periode berikutnya.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal dengan indikator :Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)

Realisasi investasi dihitung dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan pada setiap triwulan melalui aplikasi OSS (*On-line Single Submission*) oleh para pelaku usaha di Kabupaten Mamuju. Walaupun masih ada sebagian pelaku usaha yang belum menyampaikan LKPM, namun capaian realisasi investasi yang diperoleh merupakan gambaran umum kondisi penanaman modal di Kabupaten Mamuju. Tahun 2025 realisasi investasi Kabupaten Mamuju adalah **Rp.281.602.011.403** atau dengan capaian **39,83%** dari target Rp707.000.000.000.

Tabel 3.5

Capaian Realisasi Penanaman Modal Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	707.000.000.000	281.602.011.403	39,83%

Berdasarkan data capaian kinerja, sasaran strategis “Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal” diukur melalui indikator Persentase Nilai Realisasi Investasi. Pada periode pelaporan, target nilai investasi yang ditetapkan sebesar Rp707.000.000.000, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai sebesar Rp281.602.011.403 atau 39,83% dari target.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi penanaman modal belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Persentase capaian sebesar 39,83% mengindikasikan masih terdapat selisih yang cukup signifikan antara target dan realisasi, sehingga diperlukan upaya strategis yang lebih optimal dalam mendorong peningkatan investasi, baik melalui penguatan promosi investasi, penyederhanaan perizinan, peningkatan iklim usaha, maupun fasilitasi dan pendampingan kepada calon investor.

Ke depan, diperlukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi investasi agar strategi yang diterapkan dapat lebih efektif dalam mencapai target yang telah direncanakan.

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam sasaran kedua Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal tahun 2025 dengan target 90,37 terealisasi 93,283 dengan capaian **100 %** dengan kategori “Sangat Baik” berikut tabel capaian IKM pada Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.6 Capaian IKM Tahun 2025				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,37	93,283	103,2 %

Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal” diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada periode pelaporan, target IKM yang ditetapkan sebesar 90,37, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 93,283 atau dengan tingkat capaian 103,2 % (melampaui target yang ditetapkan).

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah berjalan dengan sangat baik dan mampu memenuhi bahkan melampaui ekspektasi yang ditargetkan. Nilai IKM yang lebih tinggi dari target mencerminkan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap aspek pelayanan, seperti kecepatan, ketepatan, kemudahan prosedur, sikap petugas, serta kenyamanan layanan.

Keberhasilan ini menjadi indikator positif atas upaya perbaikan dan inovasi pelayanan yang telah dilakukan. Ke depan, kualitas pelayanan perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan guna memastikan kepuasan masyarakat tetap terjaga serta mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Sasaran 3 : Terselenggaranya Birokrasi OPD yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pelayanan Prima

Indikator : NILAI AKIP OPD

Tabel 3.7 Nilai Akip Tahun 2025				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terselenggaranya Birokrasi OPD yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pelayanan Prima	NILAI AKIP OPD	BB (70)	0	0 %

3.4 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja		2024			2025	
		Targ et	Realisasi	% Capaian	Targ et	Realisa si	Capaian (%)
Menigkatk an Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	30%	45,04%	100%	15%	-72,1%	-480%
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	700.0 00.00 0. 000	1.010.6 77.136. 227	100%	707.0 00.00 0.000	281.602 .011.40 3	39,83%
Meningkatny a Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,36	93,239	103,1%	90,37	93,283	103,2 %
Terselenggaran ya Birokrasi OPD yang Efektif,Efisien dan Berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	BB (70)	BB (73,30)	100 %	BB (70)	-	-

Sumber Data : DPMPTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2025

Berdasarkan capaian Realisasi investasi Kabupaten Mamuju pada Tahun 2025 tercatat mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024. Total nilai realisasi investasi pada Tahun 2024 sebesar Rp1.010.677.136.227, sementara pada Tahun 2025 menurun menjadi Rp281.602.011.403 miliar, atau mengalami penurunan sebesar -72,1 persen dari tahun 2024. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh dinamika investasi baik pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), serta perubahan struktur investasi berdasarkan sektor usaha.

1. Penanaman Modal Asing (PMA)

Pada Tahun 2025, realisasi PMA hampir sama dibandingkan Tahun 2024, dari Rp7.263.674.697 menjadi Rp7.858.549.972 miliar. Namun demikian, kontribusi PMA terhadap total realisasi investasi keseluruhan masih relatif kecil. Investasi PMA di Kabupaten Mamuju pada umumnya tersebar pada:

- Sektor primer, terutama energi dan pengolahan sumber daya alam namun belum ada proyek yang beroperasi secara penuh;
- Sektor tersier, seperti perdagangan dan restoran.

Belum terdapat investasi PMA berskala besar yang masuk pada sektor industri pengolahan atau infrastruktur strategis.

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Terdapat penurunan tinggi pada PMDN, yang turun dari Rp1.003.413.461.530 pada Tahun 2024 menjadi Rp273.743.461.431 pada Tahun 2025. Penurunan PMDN ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Selesaiannya sejumlah proyek besar pada Tahun 2024, khususnya pada sektor dan konstruksi, yang tidak diikuti oleh proyek lanjutan berskala serupa pada Tahun 2025;
2. Belum masuknya investasi baru berskala besar, sehingga realisasi investasi didominasi oleh usaha eksisting dan investasi kecil-menengah;
3. Kebijakan efisiensi anggaran, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, yang berdampak pada perlambatan kegiatan investasi yang terkait dengan belanja pemerintah dan proyek penunjang.

4. Tinjauan Berdasarkan Sektor Usaha

a. Sektor Primer

1. sektor primer (pertambangan, energi, dan pertanian) cukup tinggi pada Tahun 2024, namun pada tahun 2025 belum ada investasi baru dalam jumlah besar
2. Tidak adanya proyek energi atau pertambangan baru berskala besar;
3. Fokus kegiatan investasi yang lebih bersifat pemeliharaan dan operasional.

b. Sektor Sekunder

Sektor sekunder (industri pengolahan dan konstruksi) juga memiliki nilai yang rendah. Pada Tahun 2025, investasi di sektor ini lebih banyak berasal dari:

1. Industri pengolahan skala kecil;
2. Belum adanya pembangunan industri baru berskala besar menyebabkan kontribusi sektor sekunder terhadap total investasi menjadi relatif rendah.

c. Sektor Tersier

Sektor tersier (perdagangan, jasa, transportasi, kesehatan, dan jasa lainnya) tetap menunjukkan aktivitas investasi, namun sebagian besar berskala kecil hingga menengah. Investasi pada sektor ini belum mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan nilai investasi daerah, meskipun berperan penting dalam menjaga kesinambungan aktivitas ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, penurunan realisasi investasi Kabupaten Mamuju Tahun 2025 lebih disebabkan oleh siklus proyek, belum dapat dilihat sebagai penurunan minat investasi. Dominasi proyek besar pada Tahun 2024 menciptakan basis pembandingan yang tinggi, sementara Tahun 2025 merupakan periode transisi dengan keterbatasan proyek baru berskala besar.

Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal” diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berdasarkan hasil pengukuran pada dua periode, kinerja pelayanan menunjukkan tren yang positif dan stabil. Pada Tahun 2024, target IKM sebesar 90,36 dengan realisasi 93,239, sehingga tingkat capaian mencapai 103,1%. Sementara pada Tahun 2025, target sedikit meningkat menjadi 90,37 dengan realisasi 93,283, dan capaian kinerja juga meningkat menjadi 103,2%.

Jika dibandingkan, terdapat kenaikan realisasi IKM dari 93,239 menjadi 93,283, meskipun peningkatannya relatif kecil. Persentase capaian juga mengalami peningkatan dari 103,1% menjadi 103,2%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak hanya mampu dipertahankan di atas target, tetapi juga mengalami perbaikan secara konsisten.

Secara keseluruhan, capaian tersebut mencerminkan komitmen yang berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pelayanan perizinan, nonperizinan, dan penanaman modal, sehingga tingkat kepuasan masyarakat tetap terjaga dan bahkan menunjukkan tren peningkatan.

3.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;

Target realisasi investasi pada akhir Renstra (tahun 2026) adalah Rp 707.000.000.000 dan telah terealisasi Rp281.602.011.403 pada tahun IV Renstra (tahun 2025), sehingga diperkirakan target pada akhir renstra dapat tercapai.

TABEL 3 . 9
REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021 + 2022 + 2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat capaian Kinerja dan reaisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
				5		6		7		TW I		TW II		TW III		TW IV		12		13		14	
1	2	3	4	8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Meningkatkan Investasi Daerah		Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	15	% 18,833,596,762	60	11,221,211,842	15	3,384,418,417	-7,12	991,760,913	-1	951,894,970	-77.69%	802,748,040	-72.01	505,271,540	-72.01	3,251,675,463	42	14,472,887,305	100	77
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal		Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	375	Milyar/Rupiah 18,833,596,762	2,080,540,603,569	11,221,211,842	707,000,000,000	3,384,418,417	123,772,379,240	991,760,913	51,452,513,409	951,894,970	50,247,731,528	802,748,040	56,129,387,226	505,271,540	281,602,011,403	3,251,675,463	2,174,407,940,703	14,472,887,305	579,842,117,521	77

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal		IKM	90	Nilai	18,83 3,596 ,762	90.35	11,22 1,211 ,842	93.28 0	3,38 4,41 8,41 7	-	991, 760, 913	91.34 2	951, 894, 970	0	802, 748, 040	93.28 3	505, 271, 540	93.28 3	3,25 1,67 5,46 3	100	14,47 2,887 ,305	100	7 7
	Terselenggaranya birokrasi DPMPPTSP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima		Nilai AKIP	A	Skor	18,83 3,596 ,762	73.3	11,22 1,211 ,842	73.34	3,38 4,41 8,41 7	-	991, 760, 913	0	951, 894, 970	0	802, 748, 040	0	505, 271, 540	0	3,25 1,67 5,46 3	BB	14,47 2,887 ,305	BB	7 7
1	Tercapainya target kinerja urusan Pemerintahan Daerah secara akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	16,05 9,871 ,641	100	9,384 ,660, 976	100	3,25 5,05 3,91 7	20%	957, 657, 313	49%	905, 836, 970	80%	766, 295, 140	100%	492, 558, 040	100	3,12 2,34 7,46 3	100	12,50 7,008 ,439	100	7 8
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterseediaan dok/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	%	79,98 9,041	100	80,69 6,040	100	11,5 80,1 45	0%	-	27%	4,54 6,00 0	0%	5,03 7,40 0	100%	1,99 6,00 0	100	11,5 79,4 00	100	92,27 5,440	100	1 1 5

	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	Dkm n	11,05 1,263	9	19,27 8,660	3	1,82 2,00 0	0	-	2 Dok	1,32 2,00 0	1 Dok	500, 000	-	-	3	1,82 2,00 0	12	21,10 0,660	86	1 9 1
	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dkm n	11,05 1,263	4	14,76 5,800	1	1,75 5,60 0	0	-		-	-	359, 600. 00	1 Dok	1,39 6,00 0	1	1,75 5,60 0	5	16,52 1,400	83	1 4 9
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dkm n	16,57 6,894	4	11,93 4,600	1	2,43 6,60 0	0	-		-	0	2,43 6,60 0.00	1 Dok	-	1	2,43 6,60 0	5	14,37 1,200	83	8 7

	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dkm n	11,05 1,263	4	13,13 4,400	1	500, 000	0	-	0	500, 000	0	-	1 Dok		1	500, 000	5	13,63 4,400	83	1 2 3
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dkm n	11,05 1,263	4	5,174 ,000	1	1,72 7,20 0	0	-		-	0	1,42 7,20 0	1 Dok	300, 000	1	1,72 7,20 0	5	6,901 ,200	83	6 2

	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Dkm n	8,155 ,832	1	6,722 ,840	1	614, 000	0	-	-	0	314, 000	1 Dok	300, 000. 00	1	614, 000	2	7,336 ,840	33	9 0
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	Dkm n	11,05 1,263	16	24,94 1,540	4	2,72 4,74 5	0	-	0	2,72 4,00 0	0	-	0	4	2,72 4,00 0	20	27,66 5,540	83	2 5 0

	Tersedianya dokumen pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterseediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	15,437,744,222	100	5,459,400,197	100	2,907,847,672	41.67%	885,719,253	60%	726,741,316	70%	700,100,340	100%	464,367,940	100	2,776,928,849	100	8,236,329,046	100	53
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	38	org/Bulan	15,266,449,653	32	10,402,926,188	33	2,829,543,872	31 OB	868,324,053	31 OB	704,912,716	36 OB	673,760,340	36 OB	451,627,940	36	2,698,625,049	68	13,101,551,237	100	86
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	Dkmn	138,140,781	24	196,890,540	1	60,304,300	0 Dok	14,540,000	0 Dok	16,684,300	0 Dok	19,720,000	1 Dok	9,360,000	1	60,304,300	25	257,194,840	104	186
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwula	24	Lprn	33,153,788	30	89,668,440	12	17,999,500	3 Laporan	2,855,200	4 Laporan	5,144,300	3 Laporan	6,620,000	2 Laporan	3,380,000	12	17,999,500	42	107,667,940	100	325

	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	mesteran SKPD	nan/ Semest eran SKPD dan Lapora n Koordin asi Penyus unan Lapora n Keuang an Bulana n/Triwu lanan/ Semest eran SKPD																					
	Tersedianya dokumen pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang berkualitas	Administras i Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persent ase keterse diaan Admini strasi Barang Milik Daerah Pada Perang kat Daerah	100	%	3,000 ,000	100	3,728 ,000	100	6,01 4,70 0	25%	1,10 4,70 0	25%	1,54 0,00 0	0%	770, 000	50%	2,00 0,00 0	100	5,41 4,70 0	100	9,142 ,700	100	3 0 5

	Terlaksanan ya Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausah aan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Lapora n Penata usahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	20	Lapo ran	3,000 ,000	8	10,65 1,400	4	6,01 4,70 0	1 Lapor an	1,10 4,70 0	1 Lapor an	1,54 0,00 0	0 Lapor an	770, 000	2 Lapor an	2,00 0,00 0	4	5,41 4,70 0	12	16,06 6,100	60	5 3 6
	Tersedianya Dokumen Pelayanan Adminstras i Kepegawaia n perangkat daerah yang berkualitas	Adminstras i Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persent ase keterse diaan dokum en adminis trasi Kepega waian	100	%	33,15 3,788	100	27,05 3,600	100	12,9 79,2 00	16.45 %	2,87 9,20 0	60%	4,00 0,00 0	0%	3,20 0,00 0	100%	2,90 0,00 0	100	12,9 79,2 00	100	40,03 2,800	100	1 2 1
	Terlaksanan ya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia n	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia n	Jumlah Dokum en Pendat aan dan Pengola han Admini strasi Kepega waian	38	Doku men	33,15 3,788	32	27,05 3,600	1	12,9 79,2 00	0 Dok	2,87 9,20 0	0	4,00 0,00 0	0	3,20 0,00 0	1 Dok	2,90 0,00 0.00	1	12,9 79,2 00	33	40,03 2,800	100	1 2 1

	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	Orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-		
	Terwujudnya Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas	100	%	134,272,840	100	659,992,148	100	81,029,200	33,33%	50,094,160	100%	10,209,000	100%	20,188,000	0%	480,000	90	80,971,160	100	740,963,308	100	552
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	74	Paket	44,205,050	81	117,049,550	10	3,422,200	10 Paket	2,134,800	0	-	0	1,287,400	0	-	10	3,422,200	91	120,471,750	100	273

	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedia kan	26	Paket	2,762 ,816	1	14,22 0,000	0	-	0	-	-	-	0	-	-	0	-	1	14,22 0,000	4	5 1 5	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disedia kan	6	Paket	4,420 ,505	5	34,44 3,840	1	990, 000	1 Paket	180, 000	0	-	0	316, 000	0	480, 000	1	976, 000	6	35,41 9,840	100	8 0 1
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140	Laporan	82,88 4,469	176	494,2 78,75 8	2	76,6 17,0 00	2 Laporan	47,7 79,3 60	2 Laporan	10,2 09,0 00	2 Laporan	18,5 84,6 00	0	-	2	76,5 72,9 60	100	570,8 51,71 8	71	6 8 9
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase dokumen administrasi Pengadaan barang milik daerah	100	%	53,10 1,250	100	88,18 9,000	100	-	67%	-	0	-	0	-	100%	-	100	-	100	88,18 9,000	100	1 6 6

	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	53,101,250	6	88,189,000	-	-	0	-				0	-	-	-	6	88,189,000	100	166	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase keterseediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	159,303,750	100	936,479,593	100	198,100,000	60.00 %	11,110,000	100%	149,112,354	100%	21,915,000	100%	15,830,000	100	197,967,354	100	1,134,446,947	100	712
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18	Laporan	159,303,750	12	615,476,937	3	156,400,000	1 Laporan	1,010,000	3 Laporan	137,012,354	3 Laporan	10,815,000	3 Laporan	7,430,000	3	156,267,354	15	771,744,291	83	484
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	6	Laporan	127,443,000	11	133,202,656	1	29,700,000	1 Laporan	8,100,000	1 Laporan	8,100,000	1 Laporan	8,100,000	1 Laporan	5,400,000	1	29,700,000	12	162,902,656	200	128

			Perleng kapan Kantor yang Disedia kan																					
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lapora n Penyedi aan Jasa Pelayan an Umum Kantor yang Disedia kan	10	Lapo ran	31,86 0,750	37	187,8 00,00 0	1	12,0 00,0 00	1 Lapor an	2,00 0,00 0	1 Lapor an	4,00 0,00 0	1 Lapor an	3,00 0,00 0	1 Lapor an	3,00 0,00 0	1	12,0 00,0 00	38	199,8 00,00 0	380	6 2 7
	Terlaksanan ya Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persent ase barang milik daerah penun jang urusan pemer intahan daerah dalam kondisi baik	100	%	159,3 06,75 0	100	162,2 60,50 0	100	37,5 03,0 00	23,8%	6,75 0,00 0	34,62 %	9,68 8,30 0	26,92 %	15,0 84,4 00	14.66 %	4,98 4,10 0	100	36,5 06,8 00	133	198,7 67,30 0	133	1 2 5

	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	Unit	106,205,500	14	121,283,560	14	32,253,000	1 Unit	5,500,000	4 Unit	8,288,300	4 Unit	14,034,400	5 unit	3,434,100	14	31,256,800	28	152,540,360	100	1444
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10	unit	53,101,250	18	40,976,940	12	5,250,000	2 Unit	1,250,000	5 Unit	1,400,000	2 Unit	1,050,000	3 Unit	1,550,000	12	5,250,000	30	46,226,940	100	87
I I I	Terciptanya Iklim yang Kondusif untuk Penanaman Modal	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Nilai Investasi	375,000,000,000	Milyar/Rupiah	350,754,688	1,069,863,467,342	23,593,940	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	1,069,863,467,342	23,593,940	285	7	

	Tersedianya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah regulasi urusan penanaman modal	100	%	350,754,688	100	23,593,940	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	-	-	100	23,593,940	100	7
	Ditetapkannya kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase jumlah regulasi urusan penanaman modal	12	Dkmn	350,754,688	5	23,593,940	0	-	0 Dok	-			0	-			-	-	5	23,593,940	42	7
	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Persentase Peta Potensi investasi tersedia	100	%	910,000,000	100	149,241,000	100	-	-	-	-	-	0%	-	100%	-	100	-	200	149,241,000	200	16

	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan an Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1	Dkm n	760,000,000	1	69,147,400	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	69,147,400	100	9	
	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	6	Dkm n	150,000,000	2	80,093,600	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	3	80,093,600	50	53		
	Meningkatnya Efektifitas Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaaman	Persentase peningkatan Jumlah investor	65	Inves tor	122,942,996	270	26,221,200	59	15,880,000	107 Investor	6,378,500	146 Inves tor	4,000,000	105 Inves tor	3,896,000	198 Inves tor	1,600,000	198	15,874,500	468	42,095,700	720	34

	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Promosi Investasi diikuti	33	%	122,942,996	33	13,110,600	40	15,880,000	0	6,378,500	0	4,000,000	0	3,896,000	-	1,600,000	-	15,874,500	33	28,985,100	100	24
	Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Dkmn	122,942,996	2	13,110,600	1	15,880,000	0 Dok	6,378,500	0	4,000,000	0	3,896,000	0	1,600,000	1	15,874,500	3	28,985,100	50	24
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	100	%	473,069,565	100.00	498,190,406	100	78,086,500	100%	21,791,100	100%	28,268,000	100%	20,082,900	100%	7,913,500	100	78,055,500	100	576,245,906	100	122

	Terlaksananya Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan online	100	%	473,069,565	100	498,190,406	100	78,086,500	100%	21,791,100	100%	28,268,000	100%	20,082,900	100%	7,913,500	100	78,055,500	100	576,245,906	100	122
	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik bagi Pelaku Usaha	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	557	Pelaku Usaha	123,018,437	16,618	299,990,476	2500	35,443,700	1459 Pelaku usaha	4,030,800	1302 Pelaku Usaha	15,680,000	1382 Pelaku usaha	10,492,900	823 pelaku usaha	5,239,000	4966	35,442,700	21,584	335,433,176	3,875	273

	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Pemantauan, Analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	878	Keg. Usaha	115,998,295	389	79,754,320	120	9,986,000	41 Keg. Usaha	5,820,000	34 Keg. Usaha	1,500,000	23 Pelaku usaha	2,048,000	30 Pelaku usaha	600,000	128	9,968,000	517	89,722,320	59	77
--	---	---	---	-----	------------	-------------	-----	------------	-----	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	-----------------	-----------	-----------------	---------	-----	-----------	-----	------------	----	----

	Tersedianya Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Mempe roleh Layana n Konsult asi Perizina n Berusa ha melalui Sistem Perizina n Berusa ha Berbasi s Risiko Terinte grasi secara Elektro nik	150	Pelak u Usah a	135,2 18,83 5	414	70,93 9,910	28	13,6 71,0 00	57 Pelak u usaha	2,47 9,00 0	84 Pelak u Usah a	5,19 2,00 0	60 Pelak u usaha	4,00 0,00 0	31 Pelak u usaha	2,00 0,00 0	231	13,6 71,0 00	645	84,61 0,910	430	6 3
	Terlaksanan ya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiata n Koordin asi dan Sinkron isasi Penent apaan Pember ian Fasilitas /Insenti f yang menjad	12	Doku men	98,83 3,998	317	47,50 5,700	1	18,9 85,8 00	1 Dok	9,46 1,30 0	0	5,89 6,00 0	0	3,54 2,00 0	0	74,5 00	1	18,9 73,8 00	318	66,47 9,500	2,650	6 7

			i Kewena ngan Kabupa ten/Kot a																					
	Meningkatn ya Kualitas Pengendali an Pelaksanaa n Penanaman Modal	Program Pengendali an Penanaman Modal	Pesent ase Pelaksa naan Monito ring dan Evaluas i penana man Modal	50	%	1,695 ,549, 659	100	1,708 ,322, 100	0	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	100	1,708 ,322, 100	200	1 0 1
	Terlaksanan ya Pengendali an Pelaksanaa n Penanaman Modal yang Menjadi Kewenanga n Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendali an Pelaksanaa n Penanaman Modal yang Menjadi Kewenanga n Daerah Kabupaten/ Kota	Persent ase Pelaku usaha yang melapo rkan LKPM (lapora n kegiata n penana man modal)	100	%	1,695 ,549, 659	35.6	1,708 ,322, 100	0	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	-	-	36	1,708 ,322, 100	36	1 0 1

	Terlaksanan ya Penyelesaia n Permasalah an dan yang dihadapi Pelaku Hambatan Usaha dalam merealisasik an Kegiatan Usahanya	Penyelesaia n permasalah an dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasik an kegiatan usahanya	Jumlah Penyele saian Permas alahan dan hambat an yang dihada pi pelaku usaha dalam mereal sasikan usahan ya	79	Keg. Usah a	425,3 55,45 9	360	120,9 05,30 0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	8	-	368	120,9 05,30 0	466	2 8
	Terlaksanan ya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementa si Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Tekhnis kepada Pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengik uti bimbin gan tekhnis /sosialis asi implem entasi perizina n berusa ha berbasi s risiko dan pengaw asan perizina n berusa ha	1042	Pelak u Usah a	645,3 94,20 0	955	1,065 ,300, 100	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	955	1,065 ,300, 100	92	1 6 5

			berbasis risiko																					
	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan	74	Keg. Usaha	624,800,000	879	522,16,700	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	879	522,16,700	1,188	84

			n; serta dilakuk an evaluasi penilaian kepatu han pelaksa naan perizina n berusa ha																					
	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Laporan database Perizinan dan Non Perizinan	100	%	131,408,213	100	76,031,920	100	35,398,000	25.0%	5,934,000	17%	13,790,000	33%	12,474,000	100%	3,200,000	100	35,398,000	100	111,429,920	100	85

	Tersedianya Pengelolaa n Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaa n Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persent ase Pengol ahan Data dan Penyus unan Lapora n	100	%	131,4 08,21 3	100	76,03 1,920	100	35,3 98,0 00	25%	5,93 4,00 0	25%	13,7 90,0 00	25%	12,4 74,0 00	25%	3,20 0,00 0	100	35,3 98,0 00	100	111,4 29,92 0	100	8 5
	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatk an	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaata n Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayan an Perizina n Berusa ha Terinte grasi Secara Elektro nik yang Diolah, Dikaji	Jumlah Data dan Informa si Perizina n dan Non Perizina n Berbasi s Sistem Pelayan an Perizina n Berusa ha Terinte grasi Secara Elektro nik yang Diolah, Dikaji	72	Doku men	131,4 08,21 3	37	76,03 1,920	12	35,3 98,0 00	3 Dok	5,93 4,00 0	3 Dok	13,7 90,0 00	3 Dok	12,4 74,0 00	3 Dok	3,20 0,00 0	12	35,3 98,0 00	49	111,4 29,92 0	68	8 5

			dan Dimanfaatkan																				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional ;

Tabel 3.10
Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Nasional (Rp)	Realisasi (Rp) Tahun 2025	Capaian (%)
2	3	5	4	5
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	940.000.000.000	281.602.011.403	29,95 %

Sasaran meningkatnya realisasi penanaman modal diukur melalui indikator kinerja berupa persentase nilai realisasi investasi. Pada Tahun 2025, target nasional realisasi investasi yang ditetapkan sebesar Rp. 940.000.000.000, sementara realisasi yang berhasil dicapai sebesar Rp281.602.011.403. Dengan capaian tersebut, persentase realisasi investasi mencapai 29,95 persen dari target yang telah ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan investasi masih memerlukan penguatan strategi, optimalisasi pelayanan perizinan, serta peningkatan promosi dan fasilitasi penanaman modal agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara lebih optimal.

3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan;

Tabel 3.11
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan /kegagalan	Solusi yang dilakukan
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/P MA	15%	-72,1%	-480%	- Tidak adanya proyek strategis baru di Tahun 2025 - Selesaiannya pembangunan proyek-proyek besar tahun 2024 - Basis perbandingan yang tinggi, Realisasi tahun 2024 relatif tinggi menjadikan efek pembanding yang besar pada tahun 2025	- Melakukan koordinasi dan kolaborasi bersama DPMPTSP Provinsi dan Kementerian Investasi/BKPM - Melakukan pendataan pada usaha skala mikro untuk ditingkatkan skala usaha menjadi Usaha Kecil atau Usaha NonUMK sesuai dengan modal usaha.
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	707.000 000.000	281.602. 011.403	39,83%	- Tidak adanya proyek strategis baru di Tahun 2025 - Selesaiannya pembangunan proyek-proyek besar tahun 2024 - Efisiensi Anggaran Kegiatan Penanaman Modal	- Melakukan koordinasi dan kolaborasi bersama DPMPTSP Provinsi dan Kementerian Investasi/BKPM - Melakukan pendataan pada usaha skala mikro untuk ditingkatkan skala usaha menjadi Usaha Kecil atau Usaha NonUMK sesuai dengan modal usaha.
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,36	93,283	103,2 %	kualitas pelayanan perizinan, non perizinan, dan penanaman modal telah berjalan	Mempertahankan standar pelayanan yang telah berjalan baik, Meningkatkan inovasi pelayanan berbasis digital, Melaksanakan pelatihan berkelanjutan bagi petugas pelayanan, Menindaklanjuti

						dengan sangat baik. Peningkatan kepuasan masyarakat dapat dipengaruhi oleh perbaikan sistem pelayanan, peningkatan kompetensi petugas, kemudahan prosedur, serta optimalisasi pelayanan berbasis elektronik.	hasil survei IKM sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan, Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan agar lebih nyaman dan efisien.
	Terselenggara nya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	BB (70)	0	0	-	-

3.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya;

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran strategis	Inidkator Kinerja	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program	Indikator Program	Capaian Realisasi anggaran Program (%)	Efisien (%)
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	39,83%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase jumlah	281.602.011.403	Efisien
				Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peningkatan Investor	198	Efisien
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,283 %	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	100	Efisien
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Laporan database Perizinan dan Non Perizinan	100	Efisien
3	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang Efektif,Efisien dan Berorientasi pelayanan prima	Nilai AKIP OPD	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Efisien

Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dengan capaian **93,283** % di dukung oleh 2 program yang terdiri atas Program Pelayanan Penanaman Modal dengan capaian 100% dan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan capaian 100 %.

3.8 Inovasi DPMPTSP Kabupaten Mamuju

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju, dipandang perlu untuk menghadirkan layanan perizinan yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberian layanan perizinan secara online melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang dilaksanakan secara langsung di lokasi pelaku usaha melalui inovasi JEBOL UMKM (Jemput Bola Layanan UMKM).

Pelaksanaan inovasi ini didasarkan pada Keputusan Bupati Mamuju Nomor 117 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi *“Jemput Bola Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju”*. Program ini merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan DPMPTSP Kabupaten Mamuju yang bertujuan mendekatkan layanan kepada masyarakat dengan cara mengunjungi langsung pelaku usaha UMKM dan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) di tempat. Seluruh proses pelayanan dalam program ini dilaksanakan secara cepat, mudah, dan tanpa dipungut biaya (gratis), sehingga diharapkan dapat meningkatkan legalitas usaha, mendorong pertumbuhan UMKM, serta memperkuat iklim investasi di Kabupaten Mamuju. Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya inovasi ini antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem aplikasi perizinan yang ada.
2. Kondisi geografis Kabupaten Mamuju yang masih sulit dijangkau jaringan internet.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan.
4. Upaya memudahkan masyarakat dalam memperoleh perizinan berusaha.

Meskipun pelayanan perizinan dan non-perizinan di DPMPTSP Kabupaten Mamuju telah dilakukan secara elektronik/online, DPMPTSP menyadari bahwa sebagian penerima layanan, khususnya para pelaku UMKM, memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan online sehingga memerlukan perlakuan khusus. Untuk itu, melalui inovasi JEBOL UMKM (Jemput Bola Layanan UMKM), Tim DPMPTSP Kabupaten Mamuju mendatangi langsung pelaku usaha UMKM di lokasi usahanya masing-masing untuk memberikan layanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Semua NIB yang diterbitkan kemudian langsung diserahkan kepada pelaku usaha di tempat usahanya, sehingga mereka memperoleh legalitas usaha secara langsung dan praktis. Inovasi ini diharapkan tidak hanya mempermudah proses perizinan, tetapi juga meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap regulasi, memperkuat legalitas usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamuju.

3.9 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.13
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dok/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	100	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	100	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	100	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	100	Menunjang

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	Menunjang
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	Menunjang
penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	Menunjang
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Kepegawaian	100	Menunjang
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	Menunjang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas	100	Menunjang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan	100	Menunjang

	pemerintahan daerah dalam kondisi baik		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	Menunjang
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100	Menunjang
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peningkatan Investor	100	Menunjang
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Promosi Investasi investasi diikuti	0	Menunjang
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal kab/kota	100	Menunjang
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal	100	Menunjang
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan online	100	Menunjang
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	99,84	Menunjang
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis RisikoTerintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis	100,00	Menunjang

	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100,00	Menunjang
Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100	Menunjang
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Laporan Database Perizinan Dan Non Perizinan	100	Menunjang
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan	100	Menunjang
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	100	Menunjang

3.10 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pada APBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, DPMPTSP mendapat alokasi anggaran belanja sebesar Rp 3.384.418.417,- yang terdiri 4 Program 10 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan. Adapun jumlah alokasi anggaran pokok sebesar Rp3.674.654.370,- meliputi belanja pegawai sebesar Rp2.929.799.370,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 744.855.000,- dan belanja modal sebesar Rp. 26.800.000,-Sedangkan jumlah alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp 3.384.418.417,-, alokasi belanja ini meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 2.829.543.872,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 554.874.545,- dan belanja modal sebesar Rp.0,- Realisasi keuangan untuk belanja pada tahun 2025 adalah Rp. 3.384.418.417,-, total menunjukkan persentase realisasi target dengan realisasi sebesar 99,05 %.

Tabel 3.14
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,255,053,917	3,121,365,563	95.89
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,580,145	11,579,400	99.99
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,822,000	1,822,000	100.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,755,600	1,755,600	100.00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,436,600	2,436,600	100.00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500,000	500,000	100.00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,727,200	1,727,200	100.00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	614,000	614,000	100.00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,724,745	2,724,000	99.97
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,907,847,672	2,776,928,849	95.50
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,829,543,872	2,698,625,049	95.37
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60,304,300	60,304,300	100.00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17,999,500	17,999,500	100.00
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6,014,700	5,414,700.00	90.02

1	penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,014,700	5,414,700	90.02
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,979,200	12,979,200	100.00
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12,979,200	12,979,200	100.00
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	81,029,200	79,989,260	98.72
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,422,200	3,422,200	100.00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	990,000	976,000	98.59
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76,617,000	75,591,060	98.66
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198,100,000	197,967,354	99.93
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156,400,000	156,267,354	99.92
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29,700,000	29,700,000	100.00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,000,000	12,000,000	100.00
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37,503,000	36,506,800	97.34
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32,253,000	31,256,800	96.91
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,250,000	5,250,000	100.00
B	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	-	-
I	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	-	-
C	Program Promosi Penanaman Modal	15,880,000	15,874,500	99.97
I	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15,880,000	15,874,500	99.97
1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	15,880,000	15,874,500	99.97
D	Program Pelayanan Penanaman Modal	78,086,500	78,055,500	99.96
I	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	78,086,500	78,055,500	99.96
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	18,985,800	18,973,800	99.94
2	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis RisikoTerintegrasi secara Elektronik	35,443,700	35,442,700	100.00
3	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	13,671,000	13,671,000	100.00

4	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	9,986,000	9,968,000	99.82
E	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	35,398,000	35,398,000	100.00
I	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35,398,000	35,398,000	100.00
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	35,398,000	35,398,000	100.00
	Jumlah	3,384,418,417	3,250,693,563	96.05

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dianalisis dan dievaluasi capaian kinerja penanaman modal tahun 2025 berdasarkan kesesuaian capaian kinerja output terhadap program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2025 dari anggaran sebesar Rp 3.255.053.917 terealisasi sebesar Rp. 3.121.365.563 atau 95.89 %
2. Program Promosi Penanaman Modal
Realisasi Program Promosi Penanaman Modal pada tahun 2025 dari anggaran sebesar RP 15.880.000 terealisasi sebesar Rp. 15.874.500 atau 99,97 %
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
Realisasi Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal pada tahun 2025 dari anggaran Rp. 78.086.500 terealisasi sebesar Rp. 78.055.500 atau 99,96 %
4. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Realisasi Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pada tahun 2025 dari anggaran sebesar Rp. 35.398.000 terealisasi sebesar Rp. 35.398.000 atau 100%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada bagian penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2025, dapat disimpulkan beberapa hal terkait pencapaian kinerja terhadap Tujuan Strategis dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025:

1. Tujuan meningkatnya investasi daerah, diukur melalui indikator persentase kenaikan nilai realisasi PMDN/PMA. Target pada tahun 2025 adalah 15%, namun realisasi mencapai -72,01%, dengan capaian sebesar -480%.
2. Sasaran meningkatnya realisasi penanaman modal, diukur melalui indikator persentase nilai realisasi investasi. Target pada tahun 2025 adalah Rp 707.000.000.000, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar Rp 281.602.011.403, sehingga capaian mencapai 39,83%.
3. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan, non-perizinan, dan penanaman modal, diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Target pada tahun 2025 adalah 90,37, dan realisasi mencapai 93,283, sehingga capaian tercatat 103,2%.

Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa capaian kinerja pada aspek pelayanan publik menunjukkan hasil yang positif, sementara capaian kinerja pada indikator investasi masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

4.2 Saran

Berdasarkan analisis realisasi investasi Kabupaten Mamuju Tahun 2025, beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja investasi adalah sebagai berikut:

1. Mendorong Masuknya Proyek Investasi Berskala Besar

- Melakukan promosi dan fasilitasi investasi khususnya pada sektor primer (energi, pertambangan) dan sekunder (industri pengolahan dan konstruksi).
- Menyediakan insentif dan kemudahan perizinan bagi investor yang ingin membangun proyek berskala besar.

2. Mendukung UMKM dan Investasi Skala Kecil-Menengah

- Memfasilitasi UMKM agar tetap produktif melalui program pendampingan, kemudahan perizinan (misal melalui OSS), dan akses pembiayaan.
- Memperluas program inovasi seperti **JEBOL UMKM** untuk meningkatkan legalitas usaha dan kapasitas pelaku usaha lokal.

3. Meningkatkan Fasilitas dan Infrastruktur Penunjang Investasi

- Memperbaiki infrastruktur dasar, aksesibilitas, dan ketersediaan energi untuk meningkatkan daya tarik investasi, khususnya pada sektor primer dan sekunder.

- o Menyediakan sarana dan prasarana strategis yang mendorong masuknya investor besar.

4. Monitoring dan Evaluasi Investasi Secara Berkala

- o Melakukan pemantauan rutin terhadap realisasi investasi berdasarkan sektor dan jenis investasi.
- o Mengambil langkah perbaikan atau stimulasi investasi yang diperlukan secara tepat waktu.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kinerja serta penetapan target kinerja yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.

Mamuju, 30 Januari 2026
KEPALA DPM -PTSP



HJ. HASNAWATY SYAM, S.E.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda -IV/c
NIP 19680928 200604 2 002